

RELEVANSI PEMIKIRAN TAN MALAKA TENTANG PARTAI POLITIK SEBAGAI KRITIK TERHADAP OLIGARKI DALAM SISTEM KEPARTAIAN INDONESIA

Ian Pasaribu

Universitas Jambi Program Studi Ilmu Politik

ianpasaribu@unja.ac.id

Abstract

Indonesia's post-Reformation party system has often been characterized by elite domination and political oligarchy practices that negate the ideological function of parties. Political parties more often act as electoral vehicles and channels for economic interests rather than as instruments for the people's struggle. In this context, Tan Malaka's ideas are relevant to be revisited as a critique of the decline in the ideological values of political parties. This study aims to analyze Tan Malaka's ideas about political parties and interpret their relevance to the oligarchic conditions in the contemporary Indonesian party system. The research uses a descriptive qualitative approach with a literature study method, focusing on discourse analysis of Tan Malaka's works such as Massa Aksi (1926), Madilog (1943), and Naar de Republiek Indonesia (1925). The results show that Tan Malaka viewed political parties as tools for class struggle and means of political education for the people, oriented towards collective consciousness, the morality of struggle, and social liberation. This view is a fundamental critique of the reality of party oligarchy in Indonesia, which ignores the participation and ideology of the people. Therefore, Tan Malaka's ideas are relevant for rebuilding the ideological and political morality basis in strengthening substantive democracy in Indonesia.

Keywords: *democracy, oligarchy, political parties, Tan Malaka, system.*

Abstrak

Sistem kepartaian Indonesia pasca-Reformasi kerap ditandai oleh dominasi elite dan praktik oligarki politik yang menegasikan fungsi ideologis partai. Partai politik lebih sering berperan sebagai kendaraan elektoral dan saluran kepentingan ekonomi dibandingkan sebagai alat perjuangan rakyat. Dalam konteks tersebut, pemikiran Tan Malaka menjadi relevan untuk

dihadirkan kembali sebagai kritik terhadap kemerosotan nilai ideologis partai politik. Penelitian ini bertujuan menganalisis gagasan Tan Malaka tentang partai politik dan menafsirkan relevansinya terhadap kondisi oligarkis dalam sistem kepartaian Indonesia kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, berfokus pada analisis wacana terhadap karya-karya Tan Malaka seperti Massa Aksi (1926), Madilog (1943), dan Naar de Republiek Indonesia (1925). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tan Malaka memandang partai politik sebagai alat perjuangan kelas dan sarana pendidikan politik rakyat yang berorientasi pada kesadaran kolektif, moralitas perjuangan, serta pembebasan sosial. Pandangan ini menjadi kritik mendasar terhadap realitas oligarki partai di Indonesia yang mengabaikan partisipasi dan ideologi rakyat. Oleh karena itu, pemikiran Tan Malaka relevan untuk membangun kembali basis ideologis dan moralitas politik dalam memperkuat demokrasi substantif di Indonesia.

Keywords: demokrasi, oligarki, partai politik, Tan Malaka, sistem.

I. INTRODUCTION

Sistem kepartaian di Indonesia pasca-Reformasi menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan demokrasi yang substantif. Meskipun demokrasi prosedural telah berjalan melalui pemilu yang kompetitif dan terbuka, praktik politik di tingkat partai masih didominasi oleh elite dan kelompok berkepentingan ekonomi. Oligarki politik mengakibatkan partai kehilangan fungsi ideologisnya dan berubah menjadi sarana perebutan kekuasaan. Fenomena ini terlihat dari proses rekrutmen politik yang elitis, minimnya kaderisasi ideologis, serta kecenderungan partai mengandalkan modal finansial ketimbang gagasan perjuangan rakyat.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya krisis ideologis dalam tubuh partai politik. Pada masa awal kemerdekaan, partai-partai lahir dari gerakan rakyat dan berbasis ideologi perjuangan, sedangkan kini partai lebih menyerupai “korporasi politik” yang dikuasai oleh segelintir elite. Gejala ini sesuai dengan tesis Robert Michels tentang *Iron Law of Oligarchy* yang menyatakan bahwa dalam setiap organisasi politik terdapat kecenderungan oligarkis, di mana sekelompok elite menguasai struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan. Dalam konteks Indonesia, oligarki partai semakin menguat akibat keterkaitan antara modal, kekuasaan, dan kebijakan publik

sebagaimana dikemukakan oleh Winters (2011) dan Hadiz (2010).

Dalam situasi ini, pemikiran Tan Malaka menjadi penting untuk dikaji ulang. Sebagai salah satu intelektual revolusioner Indonesia, Tan Malaka menempatkan partai politik sebagai alat perjuangan rakyat, bukan alat kekuasaan elite. Dalam karya *Naar de Republiek Indonesia* (1925), *Massa Aksi* (1926), dan *Madilog* (1943), ia menegaskan bahwa partai harus berperan sebagai sarana pendidikan politik dan kesadaran kelas bagi kaum tertindas. Bagi Tan Malaka, partai politik merupakan wadah pembentukan moral perjuangan dan kesadaran sosial menuju emansipasi rakyat. Pandangan ini bertentangan dengan realitas partai modern yang terjebak dalam pragmatisme dan komersialisasi kekuasaan.

Meskipun telah banyak kajian mengenai Tan Malaka, sebagian besar hanya menyoroti pemikirannya dalam konteks revolusi kemerdekaan, bukan dalam kerangka sistem kepartaian modern. Padahal, pemikiran Tan Malaka memiliki relevansi kuat untuk mengkritisi sistem politik kontemporer yang oligarkis dan elitis. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah kembali gagasan Tan Malaka tentang partai politik serta

Vol. 8, No. 2 (2025)

relevansinya terhadap kondisi kepartaian di Indonesia masa kini.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan konsep partai politik dalam pemikiran Tan Malaka, dan (2) menganalisis relevansinya sebagai kritik terhadap oligarki dalam sistem kepartaian Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian pemikiran politik Indonesia, terutama dalam menghubungkan gagasan revolusioner Tan Malaka dengan teori oligarki politik modern. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi kritis bagi reformasi sistem kepartaian dan penguatan demokrasi substantif berbasis nilai-nilai kerakyatan.

II. RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang berorientasi pada analisis teks dan pemikiran politik. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada penelusuran konsep, gagasan, serta relevansi pemikiran Tan Malaka mengenai partai politik dalam konteks sistem kepartaian Indonesia kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi karya-karya asli Tan Malaka seperti *Naar de Republiek Indonesia* (1925), *Massa*

Aksi (1926), dan *Madilog* (1943) yang berisi gagasan-gagasan fundamental tentang perjuangan rakyat, kesadaran politik, dan fungsi partai sebagai alat pembebasan sosial. Sementara data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, disertasi, artikel akademik, serta dokumen lain yang membahas pemikiran Tan Malaka dan teori oligarki partai politik di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen, dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan. Setiap data dianalisis menggunakan pendekatan wacana kritis (*critical discourse analysis*) untuk menemukan makna konseptual yang tersembunyi di balik teks, serta pendekatan hermeneutik untuk menafsirkan konteks sosial dan ideologis di mana pemikiran Tan Malaka lahir.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data, yaitu proses seleksi dan pengelompokan sumber-sumber yang relevan dengan tema partai politik dan oligarki. Kedua, interpretasi teks, yakni menafsirkan makna, konteks, dan pesan ideologis dalam karya Tan Malaka untuk menemukan konsep dasar tentang partai rakyat. Ketiga, analisis relevansi, yaitu membandingkan gagasan Tan Malaka dengan kondisi aktual sistem kepartaian

Vol. 8, No. 2 (2025)

Indonesia untuk menemukan kritik dan implikasi konseptualnya.

Dalam penelitian ini, validitas data dijaga melalui triangulasi data, yakni dengan memeriksa konsistensi antar teks Tan Malaka dan kesesuaian dengan hasil kajian ilmiah lainnya. Analisis dilakukan secara sistematis dan argumentatif dengan menekankan prinsip rasionalitas ilmiah, empirikasi teks, dan relevansi teoretis.

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu Maret hingga September 2025. Selama periode tersebut, penulis melakukan pengumpulan data pustaka, pengolahan literatur, dan analisis tematik terhadap gagasan Tan Malaka serta teori oligarki partai politik. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi ilmiah yang menjelaskan keterkaitan antara pemikiran Tan Malaka, fenomena oligarki, dan implikasinya terhadap demokrasi Indonesia. Dengan demikian, metode yang digunakan tidak hanya menelusuri aspek historis pemikiran Tan Malaka, tetapi juga mengonstruksi relevansinya secara konseptual dan normatif terhadap sistem kepartaian Indonesia masa kini. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai kerakyatan dan moralitas politik dalam pemikiran Tan

Malaka dapat menjadi kritik terhadap struktur oligarkis partai politik modern.

III. RESULTS AND DISCUSSION

A. Konsep Partai Politik dalam Pemikiran Tan Malaka

Pemikiran Tan Malaka mengenai partai politik tidak dapat dilepaskan dari konteks perjuangan anti-kolonial dan kesadarnya terhadap ketimpangan sosial-ekonomi yang melanda bangsa Indonesia pada awal abad ke-20. Dalam karya *Naar de Republiek Indonesia* (1925) dan *Massa Aksi* (1926), Tan Malaka menegaskan bahwa partai politik merupakan alat perjuangan rakyat tertindas untuk mencapai kemerdekaan sejati—bukan hanya kemerdekaan politik, melainkan juga pembebasan sosial dan ekonomi.

Bagi Tan Malaka, partai politik bukan sekadar organisasi politik formal, melainkan wadah pembentukan kesadaran kolektif (*collective consciousness*) dan moralitas perjuangan rakyat. Ia menolak gagasan partai yang hanya mengejar kekuasaan atau berorientasi pada kepentingan elite. Sebaliknya, partai harus menjadi organ rakyat sadar, yang menghimpun kaum pekerja, petani, dan kaum miskin kota dalam satu gerakan terorganisir yang berpijak pada kesetaraan sosial. Dalam pandangannya, partai politik yang sejati lahir dari bawah

(*bottom-up*), bukan diciptakan oleh elite penguasa untuk mempertahankan status quo. Dalam *Massa Aksi*, Tan Malaka menyebut partai politik ideal sebagai “sekolah politik rakyat,” tempat di mana massa belajar memahami kondisi sosialnya, mengorganisir diri, dan mengartikulasikan tuntutan perubahan. Konsep partai sebagai sekolah politik menegaskan fungsi edukatif partai, yakni mencerdaskan rakyat secara politik agar mampu berpikir kritis dan bertindak kolektif. Ia menolak bentuk partai yang birokratis, pasif, dan elitis, karena hanya akan menjauhkan rakyat dari perjuangan politik sejati.

Pandangan ini menunjukkan bahwa Tan Malaka memandang partai politik tidak hanya sebagai sarana elektoral, tetapi sebagai instrumen ideologis yang menghubungkan kesadaran rakyat dengan perjuangan sosial. Dengan demikian, partai dalam pemikiran Tan Malaka merupakan perwujudan praksis politik yang berakar pada nilai kerakyatan, moralitas, dan kesetaraan.

B. Kritik terhadap Oligarki dalam Sistem Kepartaian Indonesia

Kondisi sistem kepartaian Indonesia pasca-Reformasi menunjukkan kontras yang tajam dengan konsep partai rakyat Tan Malaka. Demokrasi elektoral yang diharapkan

menjadi arena partisipasi rakyat justru berkembang menjadi arena oligarki politik. Oligarki partai muncul karena dominasi elite yang menguasai sumber daya ekonomi, menentukan arah kebijakan partai, serta memonopoli proses rekrutmen politik. Fenomena ini sejalan dengan tesis *Iron Law of Oligarchy* yang dikemukakan oleh Robert Michels, bahwa dalam setiap organisasi politik akan selalu muncul segelintir elite yang menguasai struktur kekuasaan dan keputusan.

Dalam konteks Indonesia, sejumlah kajian seperti Winters (2011), Robison dan Hadiz (2004), serta Aspinall dan Mietzner (2010) menunjukkan bahwa oligarki politik berkembang karena hubungan simbiotik antara pemodal, politisi, dan birokrasi. Partai politik bukan lagi menjadi penggerak ideologi, melainkan “jembatan transaksi” antara kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Akibatnya, demokrasi Indonesia bersifat prosedural—ada pemilu, ada partai, namun nilai-nilai substantif seperti kesetaraan, partisipasi, dan akuntabilitas publik melemah.

Dari perspektif Tan Malaka, fenomena tersebut menunjukkan terputusnya hubungan moral antara partai dan rakyat. Partai yang seharusnya memperjuangkan kesadaran massa kini terjebak dalam pragmatisme

politik dan komersialisasi jabatan. Tan Malaka menilai bahwa tanpa kesadaran kelas dan moral perjuangan, partai akan kehilangan “jiwa kerakyatannya.” Pandangan ini menjadi kritik relevan terhadap partai-partai modern di Indonesia yang lebih berfungsi sebagai mesin elektoral ketimbang wadah ideologis.

Pemikiran Tan Malaka juga menawarkan refleksi tentang pentingnya “kesadaran massa aktif.” Ia menekankan bahwa rakyat harus menjadi subjek dalam proses politik, bukan objek mobilisasi elite. Dalam kerangka ini, pendidikan politik rakyat menjadi kunci untuk membangun kesadaran kritis dan mendorong transformasi sosial. Relevansi gagasan ini dengan kondisi Indonesia saat ini sangat kuat: di tengah apatisme publik dan rendahnya kepercayaan terhadap partai, gagasan Tan Malaka dapat menjadi inspirasi untuk membangun kembali kepercayaan publik melalui reformasi ideologis dan moral.

Selain itu, konsep Tan Malaka tentang partai massa yang egaliter dan berbasis perjuangan sosial dapat menjadi landasan bagi gerakan pembaruan partai politik. Ia menawarkan alternatif terhadap sistem oligarkis dengan menegaskan prinsip *demokrasi internal partai*, kaderisasi berbasis kesadaran, serta partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan

keputusan. Bila prinsip-prinsip ini diterapkan, maka partai tidak hanya menjadi kendaraan politik, tetapi juga ruang pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, pemikiran Tan Malaka menghadirkan kritik mendalam terhadap oligarki partai di Indonesia. Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak dapat tumbuh dalam sistem yang dikuasai oleh elite dan modal. Demokrasi sejati, menurut Tan Malaka, hanya dapat lahir dari partai-partai yang berakar pada rakyat, berjiwa perjuangan, dan berlandaskan moralitas sosial.

IV. CONCLUSION

Pemikiran Tan Malaka tentang partai politik memberikan refleksi mendalam terhadap hakikat dan fungsi partai sebagai alat perjuangan rakyat. Dalam pandangan Tan Malaka, partai bukan sekadar organisasi elektoral, melainkan instrumen ideologis yang membangun kesadaran kelas, moralitas perjuangan, serta solidaritas sosial. Partai politik ideal, menurutnya, harus menjadi *sekolah politik rakyat* yang melahirkan kader-kader berintegritas, berilmu, dan berorientasi pada kepentingan kolektif.

Gagasan tersebut menjadi kritik tajam terhadap sistem kepartaian Indonesia kontemporer yang cenderung oligarkis. Oligarki partai telah menyebabkan

terjadinya dominasi elite dan pemodal dalam struktur politik, sehingga nilai-nilai kerakyatan dan ideologis partai semakin terkikis. Partai politik di Indonesia lebih banyak berfungsi sebagai mesin kekuasaan dibandingkan sebagai wadah pendidikan politik dan artikulasi kepentingan rakyat. Relevansi pemikiran Tan Malaka terletak pada upayanya mengembalikan politik kepada moralitas perjuangan dan kesadaran rakyat. Dalam konteks demokrasi pasca-Reformasi, gagasan tersebut dapat menjadi dasar untuk menegaskan kembali pentingnya demokrasi internal partai, transparansi, kaderisasi ideologis, dan pemberdayaan politik masyarakat. Revitalisasi nilai-nilai kerakyatan Tan Malaka merupakan langkah penting untuk membangun sistem kepartaian yang lebih adil, partisipatif, dan berakar pada kepentingan rakyat banyak.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa demokrasi substantif tidak dapat tumbuh dalam struktur oligarki, tetapi hanya dapat berkembang melalui partai-partai yang menempatkan rakyat sebagai pusat perjuangan. Pemikiran Tan Malaka memberi arah moral dan ideologis bagi pembaruan sistem politik Indonesia, agar demokrasi tidak berhenti pada tataran prosedural, melainkan benar-benar menjadi alat

pembebasan sosial sebagaimana cita-cita politiknya.

REFERENCES

- Aspinall, E., & Mietzner, M. (Eds.). (2010). *Problems of democratisation in Indonesia: Elections, institutions and society*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. RoutledgeCurzon.
- Michels, R. (1962). *Political parties: A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy*. Free Press. (Original work published 1911)
- Tan Malaka. (1925). *Naar de Republiek Indonesia*. Djakarta: Pustaka Rakjat.
- Tan Malaka. (1926). *Massa Aksi*. Djakarta: Pustaka Rakjat.
- Tan Malaka. (1943). *Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika)*. Djakarta: Pustaka Rakjat.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.
- Winters, J. A., & Page, B. I. (2009). Oligarchy in the United States? *Perspectives on Politics*, 7(4), 731–751. <https://doi.org/10.1017/S153759270999177>
- Vol. 8, No. 2 (2025)*
- Slater, D. (2018). *Democratic careening: Institutional resilience and decay in Indonesia*. *American Behavioral Scientist*, 62(1), 31–46. <https://doi.org/10.1177/0002764218756921>
- Heryanto, A. (2015). *Identity and pleasure: The politics of Indonesian screen culture*. NUS Press.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo.
- Subekti, V. (2019). Oligarki politik di Indonesia: Sebuah refleksi teoritis. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 5(2), 117–130.